PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026



RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah kemudian dapat dijadikan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.
(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

I. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang (SOTK Perangkat Daerah dan Tupoksi)
   Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

B. Landasan Hukum
   Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kelola, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud Tujuan
   Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan
   Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah memuat kajian/review terhadap:
   1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun 2024) berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKjIP
   2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan (tahun 2025).
   3. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

   Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Nama Perangkat Daerah : ..... Lembar : .....

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-1)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Kerja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Kerja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				Urusan									
1	01			Bidang Urusan.....									
1	01	01		Program									
1	01	01	01	Kegiatan.....									
1	01	01	02	Kegiatan.....									
1	01	01	03	Dst...									
1	01	02		Program.....									
1	01	02	01	Kegiatan.....									
1	01	02	02	Kegiatan.....									
1	01	02	03	Dst									
1	01	03		Program.....									
1	01	03	01	Kegiatan.....									
1	01	03	02	Kegiatan.....									
1	01	03	03	Dst.....									

.....20...

Kepala Perangkat Daerah *)

.....

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan:

1. Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal, dan/atau Indikator Kinerja Kunci (diambil dari Indikator Kinerja Utaman Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah)
2. Capaian kinerja urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah (opsional bagi Perangkat Daerah yang memiliki kinerja urusan dengan mengambil data pada Narasi RKPD Tahun 2026)

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun .... (thn n-2)	Tahun .... (thn n-1)	Tahun .... (tnn n)	Tahun .... (thn n+1	Tahun .... (thn n-2)	Tahun .... (thn n-1)	Tahun .... (tnn n)	Tahun .... (thn n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:
   1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
   2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
   3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti Standar Pelayanan Minimal dan SDGs;
   4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
   5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
   Berisikan uraian mengenai:
   1. Perbandingan antara rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan (penetapan RKPD); dengan menyajikan tabel T-C.31 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	

   1. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
   2. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Renja Perangkat Daerah, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
   Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan, dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah (diambil dari hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan usulan Pokir DPRD)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (misal Disdukcapil tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dsb)

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

C. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya:
   - Pencapaian visi dan misi kepala daerah (Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah),
   - Pencapaian SDGs,
   - Pengentasan kemiskinan,
   - Pencapaian Standar Pelayanan Minimal,
   - Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
   - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
   - Pengembangan kewilayahan,
   - Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
   - Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan.
   - Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 serta prakiraan maju tahun 2026 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung F Kompleks Sekretariat Daerah
Kabupaten Kebumen Kode Pos 54311
Telp/Fax. (0287) 381570 Email: bappeda@kebumenkab.go.id
Website: bappeda.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 000.7.2.4 / 1913 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk memastikan kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan tahunan daerah, perlu dilakukan verifikasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menilai kesesuaian usulan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
b. menilai kesesuaian sistematika dan kelengkapan substansi Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen.
pada tanggal : 30 Juni 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BAPPERIDA

BAHRUN MUNAWIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 000.7.2.4/1913 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

SUSUNAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA VERIFIKATOR
1	2	3	4
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	a. Yunita Prasetyani, S.E., MA., M.Ec.Dev
		b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	b. Cahyo Ngadmanto, S.H.
2.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	b. Agus Setyawan, S.E., M.E.
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	a. Krima Karmila, S.Sos., M.Eng
		b. Perencana Ahli Madya	b. Budi Jatmiko, S.Pd., M.Pd
4.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	a. Krima Karmila, S.Sos., M.Eng
		b. Perencana Ahli Madya	b. Budi Jatmiko, S.Pd., M.Pd
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.

1	2	3	4
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	b. Agus Setyawan, S.E., M.E.
8.	Dinas Tenaga Kerja	a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	a. Krima Karmila, S.Sos., M.Eng
		b. Perencana Ahli Muda	b. Dyah Mustika Prasetyaningsih, S.T., M.Ling
9.	Dinas Pertanian dan Pangan	a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	a. Krima Karmila, S.Sos., M.Eng
		b. Perencana Ahli Madya	b. Budi Jatmiko, S.Pd., M.Pd
10.	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	a. Krima Karmila, S.Sos., M.Eng
		b. Perencana Ahli Muda	b. Dyah Mustika Prasetyaningsih, S.T., M.Ling
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	a. Krima Karmila, S.Sos., M.Eng
		b. Perencana Ahli Madya	b. Budi Jatmiko, S.Pd., M.Pd

1	2	3	4
14.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	a. Krima Karmila, S.Sos., M.Eng
		b. Perencana Ahli Muda	b. Dyah Mustika Prasetyaningsih, S.T., M.Ling
15.	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	a. Krima Karmila, S.Sos., M.Eng
		b. Perencana Ahli Muda	b. Dyah Mustika Prasetyaningsih, S.T., M.Ling
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	a. Krima Karmila, S.Sos., M.Eng
		b. Perencana Ahli Muda	b. Dyah Mustika Prasetyaningsih, S.T., M.Ling
17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Agus Setyawan, S.E., M.E.
		b. Analis Perencanaan	b. Iin Latifah, S.T.
18.	Sekretariat Daerah	a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	a. Yunita Prasetyani, S.E., MA., M.Ec.Dev
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
19.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	a. Yunita Prasetyani, S.E., MA., M.Ec.Dev
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
20.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Agus Setyawan, S.E., M.E
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
21.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Agus Setyawan, S.E., M.E
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.

1	2	3	4
22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Agus Setyawan, S.E., M.E
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
23.	Inspektorat Daerah	a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	a. Yunita Prasetyani, S.E., MA., M.Ec.Dev
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
24.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Agus Setyawan, S.E., M.E
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



MAHRUN MUNAWIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 000724 / 1913 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

SUSUNAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA KECAMATAN TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	JABATAN	NAMA
1	2	3	4
1.	Ayah	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
2.	Buayan	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
3.	Puring	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
4.	Petanahan	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Agus Setyawan, S.E., M.E
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
5.	Klirong	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Agus Setyawan, S.E., M.E
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.

1	2	3	4
6.	Buluspesantren	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Agus Setyawan, S.E., M.E
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
7.	Ambal	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a. Agus Setyawan, S.E., M.E
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
8.	Mirit	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Analis Perencanaan	b. Iin Latifah, S.T.
9.	Bonorowo	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Analis Perencanaan	b. Iin Latifah, S.T.
10.	Prembun	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Analis Perencanaan	b. Iin Latifah, S.T.
11.	Padureso	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Analis Perencanaan	b. Iin Latifah, S.T.
12.	Kutowinangun	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Taukhid, S.E.
13.	Alian	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Taukhid, S.E.

1	2	3	4
14.	Poncowarno	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Taukhid, S.E.
15.	Kebumen	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Taukhid, S.E.
16.	Pejagoan	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
17.	Sruweng	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
18.	Adimulyo	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
19.	Kuwarasan	a. Perencana Ahli Muda	a. Eka Idham I.I.P.K. Lewa, S.T., M.M.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
20.	Rowokele	a. Perencana Ahli Muda	a. Eka Idham I.I.P.K. Lewa, S.T., M.M.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
21.	Sempor	a. Perencana Ahli Muda	a. Eka Idham I.I.P.K. Lewa, S.T., M.M.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.

1	2	3	4
22.	Gombong	a. Perencana Ahli Muda	a. Eka Idham I.I.P.K. Lewa, S.T., M.M.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
23.	Karanganyar	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Cahyo Ngadmanto, S.H.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
24.	Karanggayam	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Hantari Mahadewi, S.P.
25.	Sadang	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Perencana Ahli Muda	b. Taukhid, S.E.
26.	Karangsambung	a. Perencana Ahli Muda	a. Cahyo Riyadi, S.Hut., M.AP., M.Agr.Sc.
		b. Analis Perencanaan	b. Iin Latifah, S.T.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

BAHRUN MUNAWIR

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 dan diarahkan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memuat pendahuluan, visi dan misi, kebijakan untuk mengatasi permasalahan serta program dan kegiatan. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 telah dibahas pada Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada tanggal 20 Februari 2025 yang masing-masing diikuti oleh para delegasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta instansi terkait lainnya.

Sangat disadari bahwa Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, karena tidak semua aspirasi/usulan yang tidak dapat terakomodir dalam rencana kerja ini, untuk itu saran dan masukan demi perbaikkan dan penyempurnaan Rencana Kerja di masa mendatang sangat kami harapkan dari semua pihak.

Kebumen, Agustus 2025
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

Drs. Aden Aridri Susilo,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19710529 199303 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
BAB I PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang 4
B. Landasan Hukum 5
C. Maksud dan Tujuan 7
D. Sistematika Penulisan 8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 12
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 12
B. Capaian Kinerja Pelayanan BPKPD Kabupaten Kebumen 30
C. Capaian Keuangan 34
D. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 38
E. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 41
F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 52
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 54
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 54
B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKPD Kebumen 55
C. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERNAGKAT DAERAH 60
A. Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten 60
B. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 60
BAB V PENUTUP 64
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	12
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Kebumen	16
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	31
Tabel 2.4	Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	35
Tabel 2.5	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023	38
Tabel 2.6	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kebumen	43
Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kebumen	52
Tabel 3.1	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan BPKPD Tahun 2021-2026	55
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Program	56
Tabel 4.1	Program Prioritas BPKPD Kabupaten Kebumen yang Mendukung Prioritas Kabupaten	60
Tabel 4.2	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2026	60

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen selanjutnya disingkat Renja BPKPD Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKPD, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis BPKPD Tahun 2025-2029. Renja BPKPD tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah BPKPD;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Penyusunan Renja BPKPD Tahun 2026 dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan, proses *top-down*, dan proses *bottom-up* secara berjenjang berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah dan selanjutnya disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja BPKPD Tahun 2026 merupakan:

1. Pedoman bagi BPKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026;

2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

Menghadapi perkembangan jaman saat ini, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab yang sangat besar dan dituntut untuk memberi pelayanan yang terbaik, apalagi dengan semakin terbatasnya dana Transfer Ke Daerah dari Pemerintah Pusat. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator tujuan yaitu Nilai SAKIP 74.00 pada Tahun 2025 dan predikat WTP Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Tahun 2025 serta dengan sasaran perangkat daerah yaitu Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah dengan target Indikator Sasaran yaitu Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 sebesar 15,74% sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Tahun 2021-2026.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja BPKPD tahun 2026 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219).

C. Maksud dan Tujuan

Renja BPKPD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Sedangkan tujuan dari Renja BPKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis BPKPD Tahun 2025-2029;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi,

perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

D. Sistematika Penulisan

Renja BPKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD,keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan data LKPJ/LPPD/LKJiP.

B. Analisis Kinerja

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan :

1. Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, dan/atau Indikator Kinerja Kunci (diambil dari IKU Daerah dan IKU OPD);
2. Capaian kinerja urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah (opsional bagi Perangkat Daerah yang memiliki kinerja urusan dengan mengambil data pada Narasi RKPD Tahun 2026)

C. Capaian Kinerja

Memuat perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2025) yang mengacu pada APBD tahun berjalan (tahun 2025). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti standar pelayanan minimal SDGs;
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayananan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

E. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

Sub-bab ini memuat uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (Penetapan RKPD)

F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub-bab ini memuat tentang hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten, LSM. asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan, kelurahan dan desa serta pokok-pokok pikiran DPRD yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Kebumen.

C. Program dan Kegiatan

1. Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapituasi program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan kegiatan tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, maupun terkait ketersediaan anggaran.

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
3. Rencana Tindak Lanjut.

LAMPIRAN Berisikan dokumen pendukung berupa :

1. Berita Acara Forum Organisasi Perangkat Daerah
2. Notula Forum Organisasi Perangkat Daerah
3. Daftar Hadir Forum Organisasi Perangkat Daerah
4. Foto Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 diperlukan sebagai dasar penyusunan Renja Tahun 2026. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan BPKPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Tabel 2.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			**681.849.851.000**
1.	**Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		**1.013.554.000**
	a.	Kordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	170.000.000
	b.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	323.554.000
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	300.000.000
	d.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	150.000.000
	e.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	70.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN
2.	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**625.366.000**
	a.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	193.683.000
	b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	118.000.000
	c.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	113.683.000
	d.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	200.000.000
3.	**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**551.366.000**
	a.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	110.000.000
	b.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	113.683.000
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	133.683.000
	d.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	170.000.000
	e.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	24.000.000
4.	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**679.659.565.000**
	a.	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	730.000.000
	b.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	663.901.079.000
	c.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.235.728.000
	d.	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.792.758.000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			**1.721.168.000**
5.	**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**1.721.168.000**
	a.	Penyusunan Standar Harga	85.000.000
	b.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	121.436.000
	c.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	330.000.000
	d.	Pengamanan Barang Milik Daerah	683.554.000
	e.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	141.178.000
	f.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	110.000.000
	g.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	165.000.000
	h.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	85.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			**5.117.837.000**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN
6.	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**5.117.837.000**
	a.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.066.070.000
	b.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	105.000.000
	c.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	245.265.000
	d.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	130.000.000
	e.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	411.049.000
	f.	Penagihan Pajak Daerah	3.160.453.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**21.045.103.000**
7.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**117.366.000**
	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.366.000
	b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000
8.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**15.479.547.000**
	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.282.198.000
	b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197.349.000
9.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**196.724.000**
	a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	196.724.000
10.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**415.554.000**
	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000
	b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000
	c.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.000.000
	d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000
	e.	Penyediaan Bahan/Material	75.000.000
	f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.000.000
	g.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	28.554.000
11.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**		**3.845.312.000**
	a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.596.112.000
	b.	Pengadaan Mebel	16.000.000
	c.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	233.200.000
12.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**468.600.000**
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	298.000.000
	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.600.000
13.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**522.000.000**
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.000.000
	b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN
	c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.000.000
JUMLAH			**709.733.959.000**

Untuk capaian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKPD Tahun 2024 dan realisasi Renstra BPKPD Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
5	02	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)**	70,03	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
							IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Indeks)	90,40	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	02	01	2	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Bulan)**	60	12	24	12	12	100	12	12	20
5	02	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	60	12	24	12	12	100	12	12	20
5	02	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	60	12	24	12	12	100	12	12	20
5	02	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan : Dokumen)	60	1	6	3	3	100	3	3	5
5	02	01	2	06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket	5	12	24	12	12	100	12	12	20

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
							Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)									
5	02	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan : Laporan)	60	120	240	120	120	100	120	12	5
5	02	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan : Dokumen)	5	12	24	12	12	100	12	12	20
5	02	01	2	06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	5	1	8	4	4	100	4	4	20
5	02	01	2	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Dengan Satuan : Orang)**	5	1	2	0	0	0	1	1	20
5	02	01	2	05	0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan : Orang)	460	55	110	10	10	100	55	55	11.96
5	02	01	2	01		**Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**	51	4	16	8	8	100	8	8	20

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
							Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)									
5	02	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	25	4	16	4	4	100	4	4	20
5	02	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Laporan)	25	4	8	4	4	100	4	4	20
5	02	01	2	02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Bulan)**	60	12	24	12	12	100	12	12	20
5	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan : Orang/bulan)	460	12	24	12	12	100	12	12	2,5
5	02	01	2	02	0003	Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan : Dokumen)	60	12	24	12	12	100	12	12	20
5	02	01	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan**	61	300	330	31	31	100	48	48	81.1

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
							Satuan : Unit)									
5	02	01	2	07	0002	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)	21	250	274	10	10	100	3	3	20
5	02	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	20	2	18	2	2	100	12	12	60.00
5	02	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	19	10	38	19	19	100	34	34	178,95
5	02	01	2	07	0009	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	02	01	2	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang urusan penunjang pemerintah daerah (Dengan Satuan : Bulan)	**60**	12	**12**	**12**	**12**	**100**	**12**	**12**	**20**
5	02	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan : Laporan)	60	12	24	12	12	100	12	12	20
5	02	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	12	24	12	12	100	12	12	20

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
							yang Disediakan (Dengan Satuan : Laporan)									
5	02	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Laporan)	60	12	24	12	12	100	12	12	20
5	02	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan : Unit)	**310**	**55**	**105**	**118**	**118**	**100**	**118**	**118**	**38.06**
5	02	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan : Unit)	200	44	88	44	44	100	44	44	20
5	02	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	100	60	120	60	60	100	60	60	20
5	02	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan : Unit)	10	2	4	2	2	100	2	2	20

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
5	02	03				**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Laporan BMD yang disusun sesuai dengan ketentuan (Dengan Satuan : Persen)	**100**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
5	02	03	2	01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (Dengan Satuan : Dokumen)	**66**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
5	02	03	2	01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dengan Satuan : Dokumen)	10	2	4	2	2	100	2	2	20
5	02	03	2	01	0005	Penatausahaan Barang Miik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan : Laporan)	16	2	5	2	2	100	2	2	12,5
5	02	03	2	01	0007	Pengamanan Barang Miik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan : Laporan)	20	156	312	156	156	100	56	56	280
5	02	03	2	01	0010	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtangan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	25	2	5	2	2	100	2	2	8

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
5	02	03	2	01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan : Orang)	5	1	2	1	1	100	1	1	20
5	02	02				**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah (Dengan Satuan : Persen)	**96,20**	**95,40**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5	02	02	2	01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi (Dengan Satuan : Dokumen)	**50**	**10**	**20**	**10**	**10**	**100**	**10**	**10**	**20**
5	02	02	2	01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan : Dokumen)	10	4	8	4	4	100	2	2	20
5	02	02	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan : Dokumen)	10	NA	NA	NA	NA	NA	2	2	20
5	02	02	2	01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dengan Satuan : Dokumen)	10	2	4	2	2	100	2	2	20
5	02	02	2	01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang	Jumlah Peraturan Daerah tentang	10	2	4	2	2	100	2	2	20

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
						Anggaran	Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dengan Satuan : Dokumen)									
5	02	02	2	01	0009	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dengan Satuan : Dokumen)	5	5	10	5	5	100	5	5	100
5	02	02	2	01	0011	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	10	2	4	2	2	100	2	8	80
5	02	02	2	02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang disusun (Dengan Satuan : Dokumen)	**1435**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
5	02	02	2	02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	1105	10	20	10	10	100	10	10	1,10
5	02	02	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/	205	9	18	9	9	100	9	9	4,3

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
							Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Dengan Satuan : Laporan)									
5	02	02	2	02	00 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instasi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dengan Satuan : Dokumen)	110	52	104	52	52	100	52	52	50,00
5	02	02	2	02	00 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	15	2	4	2	2	100	2	2	13

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
							Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dengan Satuan : Dokumen)									
5	02	02	2	02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan : Orang)	500	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	02	02	2	03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu (Dengan Satuan : Dokumen)	**100**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
5	02	02	2	03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan. Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Dengan Satuan : Laporan)	85	1355	2710	1355	1355	100	1355	1355	50
5	02	02	2	03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Dengan Satuan : Laporan)	5	3	6	3	3	100	3	3	60
5	02	02	2	03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang	10	2	4	2	2	100	2	2	20

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
						Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dengan Satuan : Dokumen)									
5	02	02	2	03	00 11	Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan : Orang)	250	1	2	1	1	100	1	1	0,025
5	02	02	2	03	00 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Dengan Satuan : Lembaga)	185	1	2	1	1	100	1	1	0,0185
5	02	02	2	04		**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Jumlah Laporan Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan (Dengan Satuan : Laporan)	**15**	2	**2**	**2**	**2**	**100**	**2**	**2**	**13,33**
5	02	02	2	04	00 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Dengan Satuan : Laporan)	5	449	449	449	449	100	449	449	20

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
5	02	02	2	04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Dengan Satuan : Laporan)	5	1	1	1	0	0	1	1	20
5	02	02	2	04	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Dengan Satuan : Laporan)	5	449	898	449	449	100	449	449	20
5	02	04				**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Capaian Pendapatan Daerah (Dengan Satuan : Persen)	**100%**	**101,20**	**102.59%**	**100%**	**101.54%**	**101.54**	**100%**	**100%**	**100**
5	02	04	2	01		**Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jenis Pajak Daerah yang dikelola (Dengan Satuan : Jenis)	**8**	**11**	**11**	**11**	**11**	**100**	**8**	**8**	**100**
5	02	04	2	01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	40	460 Desa 47 OPD 37 Unit	460 Desa 47 OPD 37 Unit	460 Desa 47 OPD 37 Unit	460 Desa 47 OPD 37 Unit	100	460 Desa 47 OPD 37 Unit	460 Desa 47 OPD 37 Unit	100
5	02	04	2	01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan : Laporan)	10	26 Kec	26 Kec	26 Kec	26 Kec	100	26 Kec	26 Kec	100
5	02	04	2	01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Dengan	10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
											Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
							Satuan : Unit)									
5	02	04	2	01	00 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Dengan Satuan : Laporan)	40	1.350.000	1.356.791	1.359.505	1.359.505	100	1.361.544	1.361.544	99.70
5	02	04	2	01	00 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	1.400.500	1.350.000	1.362.938	1.356.823	1.356.823	100	1.358.858	1.358.858	99.70
5	02	04	2	01	00 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	40	1.350.000	1.362.938	1.356.823	1.356.823	100	1.358.858	1.358.858	99.70
5	02	04	2	01	00 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	02	04	2	01	00 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan : Laporan)	20	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	02	04	2	01	00 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Dengan	20	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKPD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2025) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
												Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
								Satuan : Laporan)									

Mendasari data yang disajikan pada Tabel 2.2 diatas seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah seluruhnya dapat tercapai dengan optimal, hal tersebut menandakan bahwa seluruh program dan kegiatan BPKPD dapat terlaksana dengan efisien dan efektif guna mendukung pencapaian indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

B. Capaian Kinerja Pelayanan BPKPD Kabupaten Kebumen

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan kali kedelapan dan 8 tahun berturut-berturut Kabupaten Kebumen meraih Opini WTP yaitu Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 2023 dan 2024.

Dengan penilaian Opini WTP ini maka target IKU Kabupaten Kebumen berdasarkan RPJMD atau RKPD Tahun 2024 telah tercapai. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

NO.	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Indikator Tujuan :											
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah		Persentase	NA	NA	17,00	17,25	NA	NA	NA	17,00	Belum Tercapai
	Indikator Sasaran:											
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks	NA	NA	73,00	74,00	NA	NA	NA	73,00	Belum Tercapai
4	Tingkat Pertumbuhan PAD		Persentase	NA	NA	4,50	4,60	NA	NA	NA	4,50	Belum Tercapai
5	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		Persentase	NA	NA	0,62	0,63	NA	NA	NA	0,63	Belum Tercapai

*=data tahun lalu

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah pernyataan profesional pemeriksa (Badan Pemeriksa Keuangan) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Opini ini tidak dimaksudkan untuk menjamin tidak adanya penyalahgunaan atau kecurangan, melainkan sebagai bentuk penilaian apakah laporan keuangan telah:

1. Disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Menyajikan pengendalian internal yang memadai
3. Didukung oleh bukti audit yang cukup dan tepat
4. Bebas dari salah saji material.

BPK dapat memberikan beberapa jenis opini, yaitu:

- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) → laporan dianggap wajar secara menyeluruh.
- Wajar Dengan Pengecualian (WDP) → wajar, tetapi ada beberapa hal yang dikecualikan.
- Tidak Wajar (Adverse Opinion) → laporan tidak menyajikan secara wajar.
- Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) → BPK tidak bisa memberi opini karena keterbatasan bukti atau masalah lain.

b. Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Derajat Otonomi Fiskal Daerah adalah ukuran sejauh mana suatu daerah memiliki kemandirian dalam mengelola keuangan daerahnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Dengan kata lain, derajat ini menunjukkan tingkat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerahnya sendiri yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total penerimaan daerah.

Ciri Utama Derajat Otonomi Fiskal Daerah:

1. Semakin tinggi PAD dibandingkan dengan transfer pusat (DAU, DAK, DBH), semakin tinggi derajat otonomi fiskalnya.
2. Semakin besar ketergantungan pada transfer pusat, semakin rendah derajat otonomi fiskalnya.
3. Digunakan sebagai indikator kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

c. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah instrumen yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. IPKD diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan IPKD:

1. Menjadi alat ukur kinerja pengelolaan keuangan daerah secara objektif dan terstandar.
2. Mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, efektif, akuntabel, dan partisipatif.
3. Menjadi dasar dalam pembinaan, pengawasan, dan pemberian penghargaan terhadap pemerintah daerah.

Dimensi Penilaian IPKD :

IPKD terdiri dari 6 dimensi utama, yaitu:

1. Perencanaan dan Penganggaran
2. Pelaksanaan Anggaran
3. Administrasi dan Pelaporan Keuangan
4. Pertanggungjawaban Keuangan
5. Pengawasan Keuangan
6. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah

Skor dan Kategori IPKD:

Nilai IPKD diberikan dalam bentuk indeks (0 – 100) yang kemudian dikategorikan:

1. Baik (≥ 60)
2. Cukup (40 – < 60)
3. Kurang (< 40)

d. Tingkat Pertumbuhan PAD

Tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting yang mencerminkan dinamika kemampuan suatu daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan mandiri. Pertumbuhan PAD yang positif menandakan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain pendapatan sah. Sebaliknya, pertumbuhan PAD yang stagnan atau menurun dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam optimalisasi potensi ekonomi daerah, keterbatasan regulasi, atau lemahnya sistem pengelolaan pajak dan retribusi.

Secara strategis, analisis pertumbuhan PAD menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal. Pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan akan memperkuat kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat, sekaligus memperluas ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan PAD tidak hanya menggambarkan kinerja keuangan daerah, tetapi juga menjadi ukuran nyata dari keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip otonomi dan kemandirian fisk

e. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total nilai tambah ekonomi di suatu wilayah. Rasio ini memberikan gambaran mengenai kapasitas fiskal daerah dalam memobilisasi sumber-sumber pendapatan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Semakin tinggi rasio pajak daerah terhadap PDRB, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak yang ada.

Selain sebagai alat ukur fiskal, rasio pajak daerah terhadap PDRB juga mencerminkan efektivitas sistem perpajakan daerah. Rasio yang rendah dapat mengindikasikan adanya potensi penerimaan pajak yang belum tergali optimal, entah karena keterbatasan regulasi, tingkat kepatuhan wajib pajak, atau lemahnya sistem administrasi pajak. Oleh karena itu, analisis rasio ini menjadi penting untuk mendorong kebijakan peningkatan kapasitas fiskal yang lebih berkelanjutan dan memperkuat kemandirian daerah.

C. Capaian Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen diukur dari realisasi atas anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024.Realisasi anggaran dan belanja dari 4 program. 13 kegiatan. dan 52 sub kegiatan sebagaimana pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Realisasi Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	
				(Rp)	%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			**710.262.827.000**	**704.063.434.451**	**99,1**
1.	**Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		**943.869.000**	**923.435.881**	**97,8**
	a.	Kordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	167.886.000	167.173.400	99,58
	b.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	337.087.000	329.846.219	97,85
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	256.880.000	248.996.506	96,93
	d.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	132.201.000	129.377.640	97,86
	e.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	49.815.000	48.042.116	96,44
2.	**Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**507.274.000**	**494.749.923**	**97,53**
	a.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	170.314.000	168.691.250	99,05
	b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	87.695.000	82.411.400	93,98
	c.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	85.693.000	83.511.500	97,45
	d.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	163.572.000	160.135.773	97,9
3.	**Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**405.806.000**	**399.106.081**	**98,35**
	a.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	77.721.000	77.263.100	99,41
	b.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	83.481.000	83.122.000	99,57
	c.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	109.038.000	105.865.964	97,09
	d.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	112.730.000	110.124.017	97,69
	e.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	22.836.000	22.731.000	99,54

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	
				(Rp)	%
4.	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**708.405.878.000**	**702.246.142.566**	**99,13**
	a.	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	690.581.137.000	686.163.377.566	99,36
	b.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.000.000.000	323.000.000	16,15
	c.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.824.741.000	15.759.765.000	99,59
	d.	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			**1.382.346.000**	**1.355.435.911**	**98,05**
5.	**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**1.382.346.000**	**1.355.435.911**	**98,05**
	a.	Penyusunan Standar Harga	81.225.000	81.088.200	99,83
	b.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	102.474.000	101.445.280	99
	c.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	106.880.000	105.673.000	98,87
	d.	Pengamanan Barang Milik Daerah	690.102.000	680.823.661	98,66
	e.	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	138.688.000	127.143.360	91,68
	f.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	84.618.000	83.324.768	98,47
	g.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	113.619.000	112.498.342	99,01
	h.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	64.740.000	63.439.300	97,99
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			**5.184.308.000**	**5.048.926.033**	**97,39**
6.	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**5.184.308.000**	**5.048.926.033**	**97,39**
	a.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.000.101.000	927.671.850	92,76
	b.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	147.821.000	146.277.400	98,96
	c.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	264.678.000	262.470.018	99,17
	d.	Pengolahan. Pemeliharaan. dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100.016.000	97.551.041	97,54
	e.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	492.238.000	478.694.900	97,25
	f.	Penagihan Pajak Daerah	3.179.454.000	3.136.260.824	98,64
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**24.132.458.000**	**21.923.770.132**	**90,85**
7.	**Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**86.487.000**	**82.790.550**	**95,73**
	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.405.000	63.795.950	96,07
	b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.082.000	18.994.600	94,59
8.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**15.519.967.000**	**13.575.841.080**	**87,47**
	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.317.638.000	13.380.466.958	87,35
	b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	202.329.000	195.374.122	96,56
9.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**20.760.000**	**14.001.798**	**67,45**
	a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.760.000	14.001.798	67,45
10.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**336.000.000**	**328.863.373**	**97,88**
	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	10.000.000	9.926.000	99,26

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	
				(Rp)	%
		Kantor			
	b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	99.504.850	99,5
	c.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	29.592.100	98,64
	d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	3.499.000	99,97
	e.	Penyediaan Bahan/Material	52.500.000	46.522.000	88,61
	f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.000.000	137.819.423	99,87
	g.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	2.000.000	100
11.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**		**7.057.605.000**	**6.876.656.439**	**97,44**
	a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.834.508.000	6.666.271.439	97,54
	b.	Pengadaan Mebel	8.000.000	7.275.000	90,94
	c.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	215.097.000	203.110.000	94,43
12.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**589.639.000**	**533.642.788**	**90,5**
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.384.029	96,69
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	329.400.000	273.864.759	83,14
	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	256.739.000	256.394.000	99,87
13.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**522.000.000**	**511.974.104**	**98,08**
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.000.000	232.087.404	97,93
	b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	55.386.800	92,31
	c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.000.000	224.499.900	99,78
JUMLAH			**740.961.939.000**	**732.391.566.527**	**98,84**

Tahun Anggaran 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen mendapatkan anggaran sejumlah Rp740.961.939.000,00 yang terdiri dari belanja operasi sejumlah Rp25.747.207.000,00, belanja modal sejumlah Rp7.057.605.000,00, belanja tidak terduga Rp2.000.000.000,00, dan belanja transfer Rp706.157.127.000,00 untuk melaksanakan 4 program, 13 kegiatan, dan 52 sub kegiatan (anggaran setelah perubahan).

Realisasi total belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp732.388.713.223,00 atau 98,84% dari total anggaran Rp740.961.939.000. Realisasi belanja operasi sebesar Rp23.514.503.247,00 atau 91,32% dari jumlah anggaran belanja operasi Rp25.747.207.000,00. Realisasi belanja modal sebesar Rp6.876.656.439,00 atau 97,43% dari jumlah anggaran belanja modal Rp7.057.605.000,00. Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp323.000.000,00 atau 16,15% dari jumlah anggaran belanja tidak terduga Rp2.000.000.000,00.

Realisasi belanja transfer sebesar Rp701.674.553.537,00 atau 99.36% dari jumlah anggaran belanja transfer sebesar Rp706.157.127.000,00. Secara rinci pagu anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	**BELANJA OPERASI**	**25.747.207.000**	**23.514.503.247**	**91,32**
	Belanja Pegawai	15.368.903.000	13.427.923.154	87,37
	Belanja Barang dan Jasa	10.378.304.000	10.086.580.093	97,18
	Belanja Subsidi	0	0	0,00
2.	**BELANJA MODAL**	**7.057.605.000**	**6.876.656.439**	**97,43**
3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000**	**323.000.000**	**16,15**
4.	**BELANJA TRANSFER**	**706.157.127.000**	**701.674.553.537**	**99,36**
	Belanja Bagi Hasil	15.824.741.000	15.759.765.000	99,58
	Belanja Bantuan Keuangan	690.332.386.000	685.914.788.537	99,36
JUMLAH		**740.961.939.000**	**732.388.713.223**	**98,84**

Realisasi belanja operasi hanya mencapai 91,32% karena belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan. tambahan penghasilan serta honorarium. terealisasi tidak sesuai yang dianggarkan disebabkan karena terdapat pegawai yang mengalami mutasi. purna tugas. dan meninggal dunia selain itu juga terdapat efisiensi pada belanja barang dan jasa. Belanja Modal terealisasi 97,43% dan sisanya merupakan sisa tender. Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar 16,15% karena bersifat penyediaan yang digunakan untuk tanggap darurat bencana dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Sedangkan realisasi belanja transfer mencapai 99,36%.

Secara rinci realisasi anggaran belanja langsung yang realisasinya dibawah 90% antara lain program kegiatan: Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pagu Anggaran sebesar Rp1.235.728.000.00 terealisasi sebesar Rp341.838.385.00 atau 27.66% dikarenakan pos anggaran tersebut bersifat penyediaan manakala dibutuhkan.

D. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi diidentifikasi melalui permasalahan, tantangan dan peluang pelayanan perangkat daerah. Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah digunakan untuk menentukan program Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual

dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

1) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKPD Kebumen

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya :

a. Bidang pendapatan daerah :
   - Tingkat kepatuhan wajib pajak dan retribusi yang masih relatif rendah, sehingga penerimaan pajak belum optimal.
   - Basis data pajak daerah belum terintegrasi dengan baik, mengakibatkan pengawasan dan ekstensifikasi potensi pajak belum berjalan maksimal.
   - Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, jasa, maupun pemanfaatan aset daerah juga masih belum tergali sepenuhnya.
   - Tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat, sehingga kemandirian fiskal Kebumen masih terbatas.

b. Bidang pengelolaan Keuangan Daerah :
   - Kualitas perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, serta adanya program yang kurang tepat sasaran.
   - Disiplin anggaran juga masih sering terganggu oleh perubahan kebijakan, seperti refocusing anggaran pada kondisi tertentu.
   - Sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan belum merata kompetensinya.
   - Pemanfaatan aplikasi sistem informasi keuangan seperti SIPD masih menghadapi kendala teknis maupun keterbatasan literasi digital di kalangan aparatur.

c. Bidang pengelolaan barang milkik daerah :
   - Masih banyak aset yang belum tertib administrasi, baik dari sisi pendataan maupun legalitas, misalnya aset yang belum bersertifikat.
   - Pemanfaatan aset daerah masih kurang produktif, sehingga kontribusinya terhadap PAD belum signifikan.

2) Peluang dalam meningkatkan pelayanan BPKPD Kebumen.

Dalam lima tahun ke depan, BPKPD Kebumen memiliki berbagai peluang strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa peluang tersebut antara lain:

a. Digitalisasi Layanan Keuangan Daerah dengan Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempercepat proses administrasi pajak dan retribusi daerah. Layanan pembayaran daring, integrasi aplikasi keuangan, serta penguatan basis data terpusat akan meningkatkan kemudahan, transparansi, dan akurasi pengelolaan keuangan daerah.
b. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD**)** melalui penggalian potensi PAD, baik dari sektor pariwisata, jasa, maupun pemanfaatan aset daerah yang produktif. Edukasi dan sosialisasi yang intensif juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi kebocoran pendapatan.
c. Dukungan Regulasi dan Kerja Sama Strategis melalui pemerintah pusat yang mendorong penguatan fiskal daerah memberikan ruang bagi BPKPD untuk memperluas sumber pendapatan. Peluang kerja sama dengan sektor swasta melalui skema kemitraan publik-swasta juga dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan.
d. Pengembangan Kapasitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan literasi digital menjadi peluang penting dalam memperkuat kualitas pelayanan. SDM yang adaptif dan profesional akan mendukung inovasi serta memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
e. Pemanfaatan Inovasi dan Analisis Data Dengan memanfaatkan big data, analitik, serta sistem informasi keuangan yang terintegrasi, BPKPD dapat merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi daerah.
f. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang Lebih Produktif melalui Penataan administrasi dan sertifikasi aset daerah membuka peluang besar untuk meningkatkan nilai manfaat BMD. Optimalisasi pemanfaatan aset yang idle, kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga, serta pemetaan aset strategis dapat menjadi sumber PAD baru sekaligus memperkuat posisi keuangan daerah.

3) Tantangan dalam meningkatkan pelayanan BPKPD Kebumen.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, BPKPD Kebumen menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dikelola secara serius :

a. Keterbatasan Kemandirian Fiskal Daerah, Tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat masih tinggi. Hal ini membatasi ruang fiskal Kebumen dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri.
b. Rendahnya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kepatuhan wajib pajak dan retribusi masih rendah, sementara potensi PAD di sektor pariwisata, jasa, dan pemanfaatan aset belum tergarap

maksimal. Tantangan lain adalah keterbatasan regulasi dan sistem pengawasan yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan PAD.

c. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang Belum Optimal, Masih banyak aset daerah yang belum tertib administrasi maupun legalitasnya, seperti belum bersertifikat atau belum tercatat dengan baik. Aset yang idle atau tidak produktif juga menghambat kontribusi terhadap PAD.
d. Kapasitas Sumber Daya Manusia,Kompetensi aparatur dalam bidang akuntansi pemerintahan, pengelolaan aset, dan pemanfaatan teknologi informasi masih belum merata. Selain itu, tingkat literasi digital pegawai juga perlu ditingkatkan agar dapat mengimbangi modernisasi sistem keuangan daerah.
e. Pemanfaatan Teknologi dan Integrasi Sistem, meskipun penggunaan aplikasi seperti SIPD sudah diterapkan, masih terdapat kendala teknis, keterbatasan jaringan, serta kurangnya integrasi data antar-perangkat daerah. Hal ini memengaruhi kecepatan, akurasi, dan transparansi pelayanan.
f. Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas Publik, Masyarakat semakin menuntut keterbukaan dan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan. Namun, pengawasan internal maupun koordinasi antar-perangkat daerah belum sepenuhnya kuat untuk menjawab tuntutan tersebut.

4) Isu-Isu Strategis dalam meningkatkan pelayanan BPKPD Kebumen

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja yang telah diuraikan di depan. maka isu-isu strategis Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

a. Pendapatan asli daerah yang masih masih rendah dalam mendukung kemandirian keuangan daerah;
b. Indeks Kapasitas fiskal daerah yang masih rendah. sehingga mempengaruhi beberapa sektor khususnya infrastruktur;
c. Belum optimalnya pemanfaaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi daerah;
d. Perlu adanya konsistensi menyeluruh tentang pengelolaan aset yang baik dan benar; dan
e. Masih diperlukannya peningkatan sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah terutama dalam pengaplikasian SIPD-RI.

E. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana

kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki. perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Adapun *review* Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
***Review* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026**
Kabupaten Kebumen

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN				**700.004.812.287**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN**				**757.591.777.809**	Penyesuaian Anggaran
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BPKPD**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**70,03**	**19.856.018.421**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**BPKPD**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**70,03**	**21.076.593.940**	Penyesuaian Anggaran
			IKM Perangkat Daerah	**90,40**				**IKM Perangkat Daerah**	**90,40**		
I	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**	**80.000.000**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**	**101.000.000**	Penyesuaian Anggaran
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	70.000.000	Penyesuaian Anggaran
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	31.000.000	Penyesuaian Anggaran
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**17.457.947.421**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**18.808.955.755**	**Penyesuaian Anggaran**
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan	17.337.947.421	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan	18.603.955.755	Penyesuaian Anggaran
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	120.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	205.000.000	Penyesuaian Anggaran
III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis**	**92 Orang**	**60.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis**	**92 Orang**	**100.000.000**	**Penyesuaian Anggaran**
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	92 Orang	60.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	92 Orang	100.000.000	Penyesuaian Anggaran

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	
			Perundang-Undangan					Perundang-Undangan			
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**416.039.000**	**Administrasi Umum Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**489.000.000**	**Penyesuaian Anggaran**
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.361.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000	Penyesuaian Anggaran
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	130.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	160.000.000	Penyesuaian Anggaran
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	41.746.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	40.000.000	Penyesuaian Anggaran
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	BPKPD	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Dokumen	8.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	BPKPD	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Dokumen	7.000.000	Penyesuaian Anggaran
10	Penyediaan Bahan/Material	BPKPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	Penyediaan bahan/material	BPKPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	80.000.000	Sesuai
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	138.432.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	180.000.000	Penyesuaian Anggaran
12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	6.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Penyesuaian Anggaran
V	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25 Unit**	**554.232.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Unit**	**291.638.185**	**Penyesuaian Anggaran**
13	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BPKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	455.389.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BPKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	86.638.185	Penyesuaian Anggaran
14	Pengadaan Mebel	BPKPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	20.758.000	Pengadaan Mebel	BPKPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	20.000.000	Penyesuaian Anggaran

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	78.085.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	85.000.000	Penyesuaian Anggaran
16	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	Penyesuaian Anggaran
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang urusan penunjang pemerintah daerah**	**12 Bulan**	**539.800.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**BPKPD**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang urusan penunjang pemerintah daerah**	**12 Bulan**	**611.000.000**	**Penyesuaian Anggaran**
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	Penyesuaian Anggaran
18	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	311.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	310.000.000	Penyesuaian Anggaran
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	220.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	296.000.000	Penyesuaian Anggaran
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**82 Unit**	**748.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**62 Unit**	**675.000.000**	**Penyesuaian Anggaran**
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	244.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	240.000.000	Penyesuaian Anggaran
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	53.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	60.000.000	Penyesuaian Anggaran
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	450.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	375.000.000	Penyesuaian Anggaran
B	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**BPKPD**	**Persentase Capaian Pengelolaan**	**95,40%**	**672.339.358.966**	**PROGRAM PENGELOLAAN**	**BPKPD**	**Persentase Capaian Pengelolaan**	**95,40%**	**730.673.183.869**	**Penyesuaian Anggaran**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	
			Keuangan Daerah			**KEUANGAN DAERAH**		**Keuangan Daerah**			
IX	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran**	**BPKPD**	**Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi**	**11 Dokumen**	**1.419.140.000**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran**	**BPKPD**	**Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi**	**11 Dokumen**	**862.000.000**	**Penyesuaian Anggaran**
23	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	176.280.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	120.000.000	Penyesuaian Anggaran
24	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	166.280.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKPD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	70.000.000	Penyesuaian Anggaran
25	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	395.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	276.000.000	Penyesuaian Anggaran
26	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	331.880.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	BPKPD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	241.000.000	Penyesuaian Anggaran
27	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	258.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	115.000.000	Penyesuaian Anggaran
28	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	90.300.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	40.000.000	Penyesuaian Anggaran
X	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang disusun**	**287 Dokumen**	**1.020.554.150**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang disusun**	**287 Dokumen**	**523.000.000**	**Penyesuaian Anggaran**
29	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	221 Dokumen	243.745.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	221 Dokumen	158.000.000	Penyesuaian Anggaran
30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan	BPKPD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	41 Laporan	432.094.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	BPKPD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	41 Laporan	95.000.000	Penyesuaian Anggaran

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	
	Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
31	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instasi terkait		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	22 Dokumen	89.715.150	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instasi terkait	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	22 Dokumen	82.000.000	Penyesuaian Anggaran
32	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKPD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 Dokumen	120.000.000	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKPD	Jumlah Dokumen Terbitnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	3 Dokumen	108.000.000	Penyesuaian Anggaran
33	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	135.000.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	80.000.000	Penyesuaian Anggaran
XI	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan**	**20 Dokumen**	**556.593.500**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan**	**BPKPD**	**Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan**	**20 Dokumen**	**394.700.003**	**Penyesuaian Anggaran**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	
			Perangkat Daerah Tepat Waktu			**Keuangan Daerah**		**Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu**			
34	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	BPKPD	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	81.607.050	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan. Triwulan dan Semesteran	BPKPD	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	79.000.000	Penyesuaian Anggaran
35	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidas	1 Laporan	87.392.550	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidas	1 Laporan	59.700.000	Penyesuaian Anggaran
36	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	189.227.400	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	85.000.000	Penyesuaian Anggaran
37	Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	118.366.500	Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	91.000.000	Penyesuaian Anggaran
38	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	37 Lembaga	80.000.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	37 Lembaga	80.000.000	Sesuai
XII	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan**	**3 Laporan**	**669.343.071.316**	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan**	**3 Laporan**	**728.893.483.866**	**Penyesuaian Anggaran**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
39	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	648.153.160.316	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	707.703.572.400	Penyesuaian Anggaran
40	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.000.000.000	Penyesuaian Anggaran
41	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	19.189.911.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	19.189.911.000	Penyesuaian Anggaran
C	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**BPKPD**	**Persentase Laporan BMD yang disusun sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**1.134.834.900**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**BPKPD**	**Persentase Laporan BMD yang disusun sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**992.000.000**	**Penyesuaian Anggaran**
XIII	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**	**13 Dokumen**	**1.134.834.900**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**BPKPD**	**Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**	**13 Dokumen**	**992.000.000**	**Penyesuaian Anggaran**
42	Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	90.000.000	Penyusunan Standar Harga	BPKPD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	84.000.000	Penyesuaian Anggaran
43	Penatausahaan Barang Miik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	400.000.000	Penatausahaan Barang Miik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	314.000.000	Penyesuaian Anggaran
44	Pengamanan Barang Miik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	400.000.000	Pengamanan Barang Miik Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	398.000.000	Penyesuaian Anggaran
45	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtangan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	144.834.900	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtangan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	116.000.000	Penyesuaian Anggaran
46	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	100 orang	100.000.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti	100 orang	80.000.000	Penyesuaian Anggaran

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	
	Kabupaten/Kota		Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Pemerintah Kabupaten/Kota		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
D	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**BPKPD**	**Persentase Capaian Pendapatan Daerah**	**100%**	**6.674.600.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**BPKPD**	**Persentase Capaian Pendapatan Daerah**	**100%**	**4.850.000.000**	**Penyesuaian Anggaran**
XIV	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**BPKPD**	**Jenis Pajak Daerah yang dikelola**	**8 Jenis**	**6.674.600.000**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**BPKPD**	**Jenis Pajak Daerah yang dikelola**	**8 Jenis**	**4.850.000.000**	**Penyesuaian Anggaran**
47	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	11 Dokumen	250.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 Dokumen	115.000.000	Penyesuaian Anggaran
48	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	960.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	890.000.000	Penyesuaian Anggaran
49	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	100.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	45.000.000	Penyesuaian Anggaran
50	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	310.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	115.000.000	Penyesuaian Anggaran
51	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.398.345 Dokumen	500.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.398.345 Dokumen	380.000.000	Penyesuaian Anggaran
52	Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	11 Dokumen	4.350.000.000	Penagihan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8 Dokumen	3.100.000.000	Penyesuaian Anggaran
53	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	99.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	100.000.000	Penyesuaian Anggaran
54	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan	4 Laporan	75.600.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan	BPKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan	4 Laporan	65.000.000	Penyesuaian Anggaran

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	
	Retribusi Daerah		Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			
55	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	30.000.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	BPKPD	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	40.000.000	Penyesuaian Anggaran

F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan pada BPKPD Kabupaten Kebumen selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan. dalam hal ini Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (politis). Rincian usulan kegiatan yang masuk dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Kebumen
Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah/Kegiatan Penunjang Urusan/Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Hasil Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Tahun 2025- 2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen pada 20 Maret 2025 yaitu sebagai berikut.

1. Terdapat 66 desa yang sudah lunas PBB.
2. BPKPD Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 ini memiliki program unggulan baru yaitu peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Kanal *podcast* "PakDe Berbicara".
3. Terdapat 8 jenis pajak daerah Pada proyeksi pendapatan pajak daerah Kabupaten Kebumen 2026-2030 yaitu PBB, BPHTB, PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, opsen PKB, dan opsen BBNKB. Selama tahun 2026-2030 untuk PBB tidak terdapat kenaikan NJOP.
4. Dalam Renstra BPKPD disampaikan adanya usulan pemecahan dinas menjadi 2 dinas, yaitu Bapenda dan BPKAD. Namun belum ada diskusi lebih lanjut.
5. BPKPD dalam renstra juga mengajukan pembangunan ruang rapat di lantai 2 untuk kantor Jalan Indrakila.
6. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen dalam sambutannya menyampaikan bahwa kontribusi pendapatan daerah masih kecil sekali bahkan belum mencapai 20% yang artinya Kabupaten Kebumen masih

bergantung pada sumber-sumber pendapatan dari pusat. Sehingga perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik agar dapat menentukan serta memanfaatkan pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai modal kerja pembangunan Kebumen.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 merupakan RKP Tahun transisi antara RPJPN Tahun 2005-2025 dengan RPJPN Tahun 2025-2045, sekaligus penjabaran awal Rancangan Undang-Undang RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 sebagai tahap pertama pembangunan 5 tahunan. “Visi Indonesia Emas Tahun 2045 sebagai negara nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. RKP Tahun 2025 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, untuk mencapai tujuan pembangunan tahun 2025 ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
3. Prioritas Nasional 3 : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Prioritas Nasional 4 : Memperkuat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5 : Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Prioritas Nasional 6 : Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;dan
8. Prioritas Nasional 8 : Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya,serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Mendasari prioritas pembangunan nasional diatas BPKPD Kabupaten Kebumen mendukung Prioritas Nasional 7 yaitu mendukung Penguatan Fondasi Keuangan Daerah melalui intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, akses pemanfaatan pendanaan alternatif, serta tata kelola dan transparansi keuangan daerah.

Sementara itu Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2025 diarahkan pada tema "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter"yang dijabarkan dalam Prioritas Daerah Tahun 2025. Adapun Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diarahkan pada :

1. Peningkatan Kapasitas perekomomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; dan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKPD Kebumen

BPKPD Kabupaten Kebumen sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Keuangan sehingga program kegiatan di BPKPD mendukung Misi 4 Bupati Kebumen Tahun 2025-2030 yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi dan ngayemi.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan BPKPD, tujuan dan sasaran rencana kerja BPKPD tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tujuan/Sasaran Tahun ke-				
				2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah		Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Derajat Otonomi Fiskal Daerah	17,00	17,25	17,50	17,75	18,00
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	73,00	74,00	76,00	77,00	78,00

		akuntabel						
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang berkualitas	Tingkat Pertumbuhan PAD	4,50	4,50	4,60	4,60	4,70
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Program

No.	Indikator Program	Satuan	Target Tahun ke-				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,03	71,27	72,51	73,76	75,00
2	IKM Perangkat Daerah	Indeks	90,40	90,45	90,50	90,55	90,60
3	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	95,40	95,60	95,80	96,00	96,20
4	Persentase Laporan BMD yang disusun sesuai dengan ketentuan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

C. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026

Rencana kerja BPKPD Tahun 2026 mencakup 4 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang terkait program. dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS;
3) Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
4) Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD;
5) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran;dan
6) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemutungan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
3) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait;
4) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan;dan
5) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

1) Koordinasi Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan. Triwulan dan Semesteran;
2) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
3) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4) Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota;dan
5) Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota.

d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah

1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;dan
3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

1) Penyusunan Standar Harga;
2) Penatausahaan Barang Milik Daerah;
3) Pengamanan Barang Milik Daerah;
4) Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtanganan. Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;dan
5) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
4) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
5) Penetapan Wajib Pajak Daerah;
6) Penagihan Pajak Daerah;
7) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah:
8) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;dan
9) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;dan
2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veriikasi Keuangaan SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
5) Penyediaan Bahan/Material;
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;dan
7) Penatausaahan Arsip Dinamis pada SKPD.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah

1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan;
2) Pengadaan Mebel;
3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;dan
4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

e. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**.

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2) Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik;dan

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;dan
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

g. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi. misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah. dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

A. Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Prioritas Pendanaan di BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026 memperhatikan Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2026 diantaranya adalah :

Tabel 4.1
Program Prioritas BPKPD Kabupaten Kebumen
Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Tahun 2026		Prakiraan Maju 2027	
			Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,03	21.076.593.943	71,27	21.530.596.144
		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	90,04		90,05	
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	95,40	730.673.183.866	95,60	734.083.421.763
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang disusun sesuai dengan ketentuan	100%	992.000.000	100%	981.240.000
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	100%	4.850.000.000	100%	4.910.775.859
TOTAL				**757.591.777.809**		**761.506.033.766**

B. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2026 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2026

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN**	**Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	**WTP**	**757.591.777.809**
		Derajat Otonomi Fiskal Daerah	**17,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**70,03**	**21.076.593.940**
		IKM Perangkat Daerah	**90,40**	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
5.02.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**	**101.000.000**
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	70.000.000
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	31.000.000
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**18.808.955.755**
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan	18.603.955.755
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	205.000.000
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis**	**92 Orang**	**100.000.000**
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	92 Orang	100.000.000
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Daerah**	**Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**489.000.000**
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.000.000
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	160.000.000
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	40.000.000
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Dokumen	7.000.000
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	80.000.000
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	180.000.000
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.000.000
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Unit**	**291.638.185**
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	86.638.185
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	20.000.000
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	85.000.000
5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang urusan penunjang pemerintah daerah**	**12 Bulan**	**611.000.000**
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	310.000.000
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	296.000.000
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**62 Unit**	**675.000.000**
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	240.000.000
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	60.000.000
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	375.000.000
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah**	**95,40%**	**730.673.183.869**
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran**	**Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi**	**11 Dokumen**	**862.000.000**
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	120.000.000
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	70.000.000

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	276.000.000
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	241.000.000
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	115.000.000
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	40.000.000
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang disusun**	**287 Dokumen**	**523.000.000**
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	221 Dokumen	158.000.000
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah. Laporan Aliran Kas. dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	41 Laporan	95.000.000
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instasi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	22 Dokumen	82.000.000
5.02.02.2.02.0010	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Terbitnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	3 Dokumen	108.000.000
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	80.000.000
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu**	**20 Dokumen**	**394.700.003**
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan. Triwulan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	79.000.000
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD. BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidas	1 Laporan	59.700.000
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	85.000.000
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	91.000.000
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	37 Lembaga	80.000.003
5.02.02.2.04	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah Laporan Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan**	**3 Laporan**	**728.893.483.866**

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	707.703.572.400
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.000.000.000
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	19.189.911.000
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Laporan BMD yang disusun sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**992.000.000**
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**	**13 Dokumen**	**992.000.000**
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	84.000.000
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Miik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	314.000.000
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Miik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	398.000.000
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan. Pemanfaatan. Pemindahtangan. Pemusnahan. dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	116.000.000
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	80.000.000
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Capaian Pendapatan Daerah**	**100%**	**4.850.000.000**
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jenis Pajak Daerah yang dikelola**	**8 Jenis**	**4.850.000.000**
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah. serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 Dokumen	115.000.000
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	890.000.000
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	45.000.000
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	115.000.000
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.398.345 Dokumen	380.000.000
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8 Dokumen	3.100.000.000
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	100.000.000
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	65.000.000
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	40.000.000

BAB V
PENUTUP

Pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat berarti bahwa hasil pembangunan yang akan dicapai bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Selain itu resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya *benefit* yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga *cost*- nya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2026. Selain itu, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari BPKPD. dan juga jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BPKPD Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan BPKPD tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan Renja BPKPD Kabupaten Kebumen tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan-karyawati BPKPD Kabupaten Kebumen serta peran aktif seluruh stakeholder BPKPD Kabupaten Kebumen.

Kebumen, Agustus 2025
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Drs. Adri Andri Susilo. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19740529 199303 1 001

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Agus Setyawan	
Hantari Mattaseri	

LAMPIRAN

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KEBUMEN
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						**757.591.777.809,00**							**711.906.033.766,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**757.591.777.809,00**							**711.906.033.766,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**757.591.777.809,00**							**711.906.033.766,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.076.593.940,00**						**-**	**21.530.596.144,00**	
		[Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah]	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah** **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**75.00** **90.60**	**76.60** **89.63**	**69.78** **90.30**	**70.03** **90.40**	**21.076.593.940,00**	-	-	-	-	-	-	**21.530.596.144,00**	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			10 Dokumen	101.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen	-	100.420.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	31.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		30.420.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	18.808.955.755,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen	-	19.225.326.813,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				92 Orang/bulan	18.603.955.755,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		19.016.226.813,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	205.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		209.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis*	-			92 Orang	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen	-	101.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				92 Orang	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		101.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	489.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen	-	495.180.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		18.360.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	160.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		163.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		40.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		7.140.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		81.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	180.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		180.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		4.080.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Unit	291.638.185,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen	-	464.149.331,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	86.638.185,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		359.149.331,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	20.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	85.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	BPKPD Kabupaten Kebumen		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang urusan penunjang pemerintah daerah*	-			12 Bulan	611.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen	-	643.220.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		5.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	310.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		316.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	296.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		321.920.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			62 Unit	675.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen	-	500.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	240.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		241.640.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	60.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		59.060.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	375.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	BPKPD Kabupaten Kebumen		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**730.673.183.869,00**						**95,40 %**	**684.483.421.763,00**	
		[Meningkatnya tata kelola keuangan daerah]	**Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah**	**96.20**	**95.00**	**95.20**	**95.40**	**730.673.183.869,00**	-	-	-	-	-	-	**684.483.421.763,00**	-
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi*	-			11 Dokumen	862.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen	-	874.440.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		71.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	276.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		279.120.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	241.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		245.820.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		117.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		40.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang disusun*	-			287 Dokumen	523.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen	-	528.740.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				221 Dokumen	158.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		161.160.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				41 Laporan	95.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		94.540.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				22 Dokumen	82.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		81.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				3 Dokumen	108.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		110.160.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		81.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu*	-			20 Dokumen	394.700.003,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen	-	400.234.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				17 Laporan	79.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		80.580.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	59.700.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		58.534.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		86.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	91.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		92.820.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				37 Lembaga	80.000.003,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		81.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan*	-			3 Dokumen	728.893.483.866,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen	-	682.680.007.763,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	707.703.572.400,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA DESA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		660.425.611.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	2.000.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		2.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	19.189.911.466,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		20.254.395.963,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**992.000.000,00**						**100 %**	**981.240.000,00**	
		[Meningkatnya tata kelola Barang Milik Daerah]	**Persentase Laporan BMD yang disusun sesuai dengan ketentuan**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**992.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**981.240.000,00**	-
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan*	-			13 Dokumen	992.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen	-	981.240.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	84.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		85.680.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				3 Laporan	314.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		304.980.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Laporan	398.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		390.660.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	116.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		118.320.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	80.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		81.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**4.850.000.000,00**						**100 %**	**4.910.775.859,00**	
		[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	**Persentase Capaian Pendapatan Daerah**	**100.00**	**102.40**	**100.00**	**100.00**	**4.850.000.000,00**	-	-	-	-	-	-	**4.910.775.859,00**	-
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jenis Pajak Daerah yang dikelola*	-			8 Jenis	4.850.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen	-	4.910.775.859,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				8 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kabupaten Kebumen		110.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	890.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Unit	45.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		40.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				8 Laporan	115.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		102.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1398345 Dokumen	380.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		387.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				8 Dokumen	3.100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		3.179.575.859,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		102.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	65.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		59.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				4 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 4. Peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Kabupaten Kebumen		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H							**757.591.777.809,00**							**711.906.033.766,00**	

Form 8

Usulan APBN Non DAK Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Perangkat Daerah Tujuan	Uraian Kegiatan	Keluaran		Lokasi	Lokasi Detail	APBN	Keterangan
			Uraian	Volume				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

NIHIL

Kebumen , 20 Februari 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Drs. Aden Andri Susilo, M.Si

Pembina Utam Muda

NIP. 197404291993031001

Form 9

Usulan Bantuan Provinsi Jawa Tengah Bantuan Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan	Khusus Bantuan Sarpras dan Pendidikan		Permasalahan	Usulan Kegiatan	Sasaran		Keluaran		Lokasi	Usulan Anggaran			Rangking	Keterangan
					Jenis Bangunan	Volume			Ukuran	Volume	Ukuran	Volume		APBD Prov (Rp.)	APBD (Rp.)	Jumlah (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								NIHIL										

Kebumen, 20 Februari 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Drs. Adeh Andi Susilo, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19740429199303 1001

Form 10
Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen Tahun 2026

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Pengusul	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Bidang	Sub Bidang	Kementerian	Menu	Kewenangan	Jenis	Pelaksana	Rincian	Rincian Detail	Prioritas	Pengadaan	Satuan	Volume	Unit Cost	Nilai Usulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									NIHIL											

Kebumen, 20 Februari 2025
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Drs. Adien Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740425 [illegible] 0031001

Form 11

Usulan APBN Non DAK Kabupaten Kebumen Tahun 2026

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Kementerian	Program	Kegiatan	Output	Satuan Output	Usulan	Total Usulan Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8

NIHIL

Kebumen , 20 Februari 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Drs. Aden Andri Susilo, M.Si

Pembina Utam Muda

NIP. 197404291993031001

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 20 Maret 2025
Jam	: 09.00 WIB
Tempat	: Aula Akuntabilitas BPKPD Kabupaten Kebumen

Forum Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 :

MENYEPAKATI

KESATU : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen..

KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 20 Maret 2025
Pimpinan Sidang
Kepala BPKPD Kabupaten Kebumen

Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

NO.	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Bambang S	Unsur Legislatif	Ketua Komisi C DPRD Kebumen	
2.	Hantari	Unsur Perangkat Daerah	Bappeda Kabupaten Kebumen	
3.	Agus R	Unsur Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Kebumen	
4.	Wahyudi	Unsur Kecamatan	Kecamatan Karangsambung	
5.	Adimas Wahyu	Unsur Masyarakat	Notaris/PPAT	

DELEGASI BPKPD KABUPATEN KEBUMEN PADA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

NO.	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Hernyatun	Delegasi BPKPD Kabupaten Kebumen	Universitas Muhammadiyah Gombong	

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Aula Akuntabilitas BPKPD Kabupaten Kebumen

Forum Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 :

MENYEPAKATI

KESATU : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

KEDUA : Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.

KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Renstra Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada dictum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 20 Maret 2025
Kepala Perangkat Daerah
selaku pimpinan sidang
BPKPD Kabupaten Kebumen

Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.	Bambang S	Unsur Legislatif	Ketua Komisi C DPRD Kebumen	
2.	Hartari	Unsur Perangkat Daerah	Bappeda Kabupaten Kebumen	
3.	Agus R	Unsur Perangkat Daerah	Inspektorat Kabupaten Kebumen	
4.	Wahyudi	Unsur Kecamatan	Kecamatan Karangsambung	
5.	Adimas Wahyu	Unsur Masyarakat	Notaris/PPAT	

DELEGASI BPKPD KABUPATEN KEBUMEN PADA MUSRENBANG RPJMD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Heriyatun	Delegasi BPKPD Kabupaten Kebumen	Universitas Muhammadiyah Gombong	

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 2 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311,
Telepon (0287) 381051, Faksimile +62287 384546,
Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id, Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id

Kebumen, 19 Maret 2025

Nomor : 000 / 246 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
3. Terlampir
di
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Kamis /20 Maret 2025

waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai

tempat : Aula Akuntabilitas BPKPD Kabupaten Kebumen, Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen

acara : Forum Perangkat daerah dalam rangka penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

keterangan : Materi Dapat diakses melalui link https://bit.ly/materiforumBPKPD

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197405291993031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
3.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
7.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
9.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
10.	Camat Gombong
11.	Camat Karangsambung
12.	Camat Prembun
13.	Universitas Putra Bangsa
14.	Seluruh Pejabat Struktural di Lingkungan BPKPD Kabupaten Kebumen
15.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen Bapenda Prov Jateng
16.	Notaris/PPAT Adimas Wahyu Widayat, S.H, M.Kn
17.	Notaris/PPAT Evaristus Ratri Kartika, S.H
18.	Ketua LSM Formasi
19.	Kepala Desa Gemeksekti
20.	Kepala Desa Lembupurwo
21.	Trio Azana Style Hotel (Wajib Pajak Hotel)
22.	PT. Pesta Pora Abadi (Mie Gacoan Kebumen)
23.	Hotel Candisari Kebumen
24.	Universitas Muhammadiyah Gombong
25.	Kepala Desa Lembupurwo Kec. Mirit
26.	Kepala Desa Gemeksekti Kec. Kebumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATENKEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 2Kebumen, Kode Pos 54311,Telepon(0287) 381051,
Faksimile+62287 384546,Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Akuntabilitas BPKPD Kabupaten Kebumen Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen
Acara : Forum Perangkat daerah dalam rangka penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	[illegible]	BPKPD	1.
2	Hanis S	BPKPD	2.
3	Viodo H	BPKPD	3.
4	Arni	BPKPD	4.
5	Dian A	BPKPD	5.
6	Agus Riyanto	[illegible]	6.
7	Bambang S		7.
8	Arman H	BPKPD	8.
9	Putut S	BPKPD	9.
10	Agus Fendi R	BPKPD	10.
11	Abrian	Kec. Prembun	11.
12	Hari Budi S	BPKPD.	12.
13	Fany Fauzan	BPKPD	13.
14	Martin	—	14.
15	Indah Budi Kristianti	Pistapang	15.
16	Wasiman	Disparbud	16.
17	Kristiana M	BPKPD	17.
18	Hartari	Bappeda	18.

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
19	Rahma N	Bappeda	19.
20	Adimar	Notaris / PPAT	20.
21	Winri Agustina	Dinkes. pg kb	21.
22	Eny H.	BPKPD	22.
23	Endra. W	BPKPD	23.
24	Wiweto	DPCIPTR	24.
25	Wahyu	Kec. Wiringin	25.
26	KARTIKA	notaris	26.
27	Wahyu B	Gandry	27.
28	Dese Purwantoro	Disperindagkukm	28.
29	Sipreipte	BPKPD	29.
30	Kusumontugtyar R	BPKPD	30.
31	M. Suyagiri	BPKPD	31.
32	Wiandini . SP	UPB	32.
33	Umi Hajarotun	Disdikpora	33.
34	Dini	DCHKP	34.
35	Wahyu B	DLHKP	35.
36	Yuni Farah N.M		36.
37	Hernigatun	UNIMUGO	37.
38	Sri Wahyuwati	BPKPD	38.
39	Sri Pamilah	Disperindag	39.
40	Umi Juli	Dinas PMD.	40.
41	M. Iqbal	UPPD Kbm	41.
42	Wajar Aziz	Trio Azzam	42.
43	Endah Wahyu	BPKPD	43.
44	Dedi Prayag	BPKPD	44.
45	SUBANDINI	BPKPD	45.
46	Sukarti	-II-	46.

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
47	[illegible]		47.
48	Ans. M.F	BPKPD	48.
49	Warijan		49.
50	Anjar		50.
51	Ami		51.
52	Pramono		52.
53	Hany Fatmawati	BPKPD	53.
54	Khoerul A		54.
55	Umi Mazuroh		55.
56	Erni Astuti	BPKPD	56.
57	M. Kuhaeni		57.
58	Handiyanto		58.
59	Iman		59.
60	Agus Supriyanto	BPKPD	60.

PPTK

Dedy Prayogi, S.E.
NIP. 19880427 201101 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos-el bpkpd@kebumenkab.go.id

NOTULA

Sidang/Rapat	:	Forum Perangkat daerah dalam rangka penyusunan Renstra Tahun 2025- 2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Hari/Tanggal	:	Kamis, 20 Maret 2025
Surat Undangan	:	000/246/2025
Waktu Sidang/Rapat	:	Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Acara	:	Forum Perangkat daerah dalam rangka penyusunan Renstra Tahun 2025- 2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Pimpinan Sidang/Rapat		
Ketua	:	Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Sekretaris	:	Haris Setyawan, S.Kom., M.S.E.
Pencatat	:	Dedy Prayogi, S.E.
Peserta Sidang/Rapat	:	1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan; 3. Terlampir
Kegiatan Sidang/Rapat	:	Per tanggal 20 Maret 2025, terdapat 66 desa yang sudah lunas PBB. BPKPD Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 ini memiliki program unggulan baru yaitu peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Kanal *podcast* "PakDe Berbicara". Di Jawa Tengah sendiri baru 3 kabupaten yang sudah menerapkan KKPD dan Kabupaten Kebumen juga akan segera menerapkannya. *Podcast* "PakDe Berbicara" rencananya akan mengungggah *podcast* dengan tema THR dan tambahan SILTAP setelah bupati melakukan konferensi pers. THR sendiri nantinya akan diberikan kepada PNS, P3K, P2K, dan tenaga *outsourcing*. Sementara tambahan SILTAP akan diberikan kepada perangkat desa. Terdapat 8 jenis pajak daerah Pada proyeksi pendapatan pajak daerah Kabupaten Kebumen 2026-2030 yaitu PBB, BPHTB, PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, opsen PKB, dan opsen BBNKB. Selama tahun 2026-2030 untuk PBB tidak terdapat kenaikan NJOP, namun akan dilakukan perbaruan keadaan di lapangan seperti tanah yang semula kosong namun saat ini sudah terdapat bangunan di

atasnya. Berkaitan dengan pajak hotel dan pajak hiburan, perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak sebagai upaya peningkatan kunjungan ke Kebumen. BPKPD berharap melalui Komisi C DPRD dapat mengundang Samsat untuk melakukan diskusi bersama agar target dapat tercapai.

Dalam Renstra BPKPD disampaikan adanya usulan pemecahan dinas menjadi 2 dinas, yaitu Bapenda dan BPKAD, di mana usulan ini merupakan program dari bupati dan wakil bupati periode sebelumnya. Usulan ini sudah disampaikan kepada bupati dan wakil bupati terpilih saat ini, namun belum ada diskusi lebih lanjut. Selain itu terdapat pula usulan gedung baru yang rencana akan digunakan untuk menyimpan kendaraan-kendaraan yang sudah tidak terpakai. BPKPD dalam renstra juga mengajukan pembangunan ruang rapat di lantai 2 untuk kantor Jalan Indrakila.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen dalam sambutannya menyampaikan bahwa kontribusi pendapatan daerah masih kecil sekali bahkan belum mencapai 20% yang artinya Kabupaten Kebumen masih bergantung pada sumber-sumber pendapatan dari pusat. Di sisi lain, kemampuan keuangan daerah kita selalu dalam posisi tinggi dan kita harus terus berupaya menjaga kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kebumen tetap dalam posisi tersebut. Perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik agar dapat menentukan serta memanfaatkan pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai modal kerja pembangunan Kebumen.

SESI DISKUSI

1. Universitas Muhammadiyah Gombong
   a. Berdasarkan paparan yang disampaikan, mengapa rencana anggaran untuk rapat koordinasi banyak sekali?
   b. Sebelumnya disampaikan bahwa tidak ada kenaikan NJOP, namun beberapa tahun kemarin terjadi kenaikan NJOP sekitar 300%.
   c. Berkaitan dengan sertifikasi tanah memang menguntungkan masyarakat karena prosesnya gratis, namun di sisi lain juga pajaknya menjadi lebih mahal.
   d. Barang bekas kendaraan yang nilai ekonomisnya sudah 0, apakah tidak bisa dibuat berita acara untuk pemusnahan atau diserahkan ke sekolah seperti SMK untuk bahan ajar?
   e. Apakah tidak ada biaya pemeliharaan kendaraan?

   Tanggapan :
   a. Sifat dari rapat koordinasi ini yaitu menyelenggarakan dan menghadiri undangan. BPKPD sendiri lebih banyak menghadiri undangan daripada menyelenggaran rapat koordinasi. Selain itu, di dalam

sub kegiatan rapat koordinasi terdapat rekening perjalanan dinas, makan minum rapat, dan lain-lain. Kami berusaha mengupayakan rapat secara *online*, namun terdapat beberapa yang memang harus dilakukan secara tatap muka seperti rapat rekonsiliasi, rapat permasalahan barang milik daerah, dan lain sebagainya.

b Kenaikan NJOP dapat dilakukan secara parsial dan massal. Kenaikan NJOP secara massal terjadi 1 kali setiap 3 tahun. Kenaikan parsial ternyata manakala terdapat perbaruan seperi dari tanah kosong menjadi bangunan atau perbaruan lainnya. Kenaikan sebesar 300% tersebut kemungkinan merupakan kenaikan secara parsial

c. Sertifikasi tanah secara gratis dilakukan melalui program PTSL. Dalam pelaksanaannya juga harus mengundang desa dan panitia pengukuran tanah.

d. Barang milik daerah ketika sudah tidak digunakan untuk menunjang kegiatan akan dilakukan penilaian terhadap barang tersebut. Barang yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dijual kembali. Pemberian kendaraan bekas ke sekolah seperti SMK dilakukan secara seleklif, karena kewenangan untuk SMA/SMK ada di provinsi. Namun sebelumnya sudah ada permintaan kendaraan bekas dari SMK di Kabupaten Kebumen dan sudah didistribusikan ke sekolah yang bersangkutan.

e. Setiap tahun selalu ada anggaran untuk pemeliharaan kendaraan dinas.

2. Kecamatan Karangsambung

a. Capaian PBB Kecamatan Karangsamabung tidak pernah 100%. Hal ini karena beberapa kasus yang terjadi di lapangan seperti wajib pajak sudah membayar PBB melalui perangkat desa, namun ternyata uang tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi terlebih dahulu. Kami menyarankan untuk adanya pembayaran dengan metode lain serta edukasi kepada masyarakat terkait hal tersebut.

b Apakah memungkinkan apabila kecamatan juga menerima insentif PBB?

c. Kecamatan Karangsambung memiliki 2 bangunan bekas kantor Kecamatan Karangsambung dan bekas rumah dinas camat. Kedua bangunan ini terletak di posisi yang strategis dan saat ini Pemerintah Desa Karangsambung tengah meminta agar bangunan tersebut dihibahkan kepada desa. Mohon untuk ditindaklanjuti apakah akan dihibahkan kepada desa atau akan dikelola oleh pemerintah daerah.

d. Selain itu, di Kecamatan Karangsambung juga terdapat tanah kosong yang luas. Sebelumnya terdengar adanya rencana pembangunan terminal di tanah tersebut, namun hingga kini belum terlaksana. Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Kecamatan Karangsambung mengusulkan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen untuk dibangun rumah sakit tipe D di tanah tersebut. Hal ini dikarenakan akses masyarakat Kebumen bagian utara menuju faskes rujukan yang berlokasi di Kecamatan Kebumen, Kecamatan Sruweng, dan Kecamatan Gombong cukup jauh.

Tanggapan :

a. Metode pembayaran PBB sudah tercantum dalam SPPT. BPKPD tidak pernah memerintahkan untuk membayar kepada perangkat desa, karena perangkat hanya bertugas menyampaikan SPPT kepada wajib pajak. BPKPD juga bekerja sama dengan Bumdes untuk pembayaran PBB agar lebih memudahkan masyarakat. BPKPD pernah mengadakan lomba konten edukasi pembayaran PBB sebagai salah satu cara menyampaikan metode pembayaran PBB kepada masyarakat.
b. Insentif PBB untuk kecamatan akan coba untuk dikaji karena sebenarnya yang berhak menerima insentif PBB adalah OPD pengampunya. BPKPD akan mencoba berkoordinasi dengan dinas-dinas yang membantu seperti inspektorat apakah dapat diberikan insentif atau penghargaan dalam bentuk lainnya kepada pihak-pihak yang secara tidak langsung membantu dalam pemungutan PBB seperti kecamatan. Sebelumnya telah diberikan penghargaan dalam bentuk stimulan BBM.
c. Bangunan bekas rumah dinas camat di Kecamatan Karanganyar tidak akan diserahkan kepada desa karena regulasinya yang tidak memungkinakan. BPKPD bekerjasama dengan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) dalam upaya rencana pemanfaatannya. Bangunan tersebut rencananya akan digunakan sebagai penginapan melihat kunjungan ke Geopark cukup tinggi. Begitu pula dengan bangunan bekas kantor kecamatan Karangsambung yang diminta oleh desa sampingnya, bangunan tersebut tetap dikelola oleh pemerintah daerah dan nantinya akan dipaparkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten sebagai lokasi pengembangan Geopark.

d. Berkaitan dengan tanah kosong tersebut, hingga saat ini masih ada permasalahan. Panitia pembelian kurang cermat saat pembelian dan baru diketahui setelahnya jika terdapat 2 sertifikat dari 8 sertifikat hak milik yang tidak dapat dilakukan *splitsing*. Hal ini dikarenakan terdapat 1 sertifikat yang ternyata sudah dijualbelikan sebelum dibeli oleh pemerintah daerah. Usulan untuk pembangunan rumah sakit tipe D di atas tanah tersebut merupakan usul yang bagus. Usul ini akan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan.

Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Dedy Prayogi, S.E.
NIP 19880427 201101 1 005